

Kondisi dan Disparitas APK SMP Tahun 2007 Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Oleh: Ida Kintamani*)

Abstrak: Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang akan dituntaskan tahun 2008 menggunakan ukuran APK SMP sebesar 95,00%. Ukuran penuntasan ada lima, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan belum tuntas. Untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dapat dituntaskan, dibahas APK SMP dan disparitas APK SMP tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Populasi yang digunakan adalah 440 kabupaten/kota. Hasilnya menunjukkan hanya 187 kabupaten/kota (42,50%) yang telah tuntas paripurna (APK SMP >95%) dan yang belum tuntas (APK <80%) sebanyak 111 kabupaten/kota (25,23%). Provinsi DI Yogyakarta telah tuntas paripurna, provinsi Sulawesi Utara telah tuntas utama, Riau dan Bali telah tuntas madya, dan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi telah tuntas pratama. Dilihat dari disparitas APK secara nasional 23,93% hanya menurun 0,06 % dari tahun 2006. Disparitas terbesar di Nusa Tenggara Timur (45,30%) dan terkecil di Maluku Utara (1,28%).

Kata kunci: disparitas, angka partisipasi kasar, penuntasan, wajib belajar, pendidikan dasar 9 tahun

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 (Depdiknas, 2007) menetapkan adanya tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

(1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra pendidikan. Untuk mengukur pencapaian pada masing-masing pilar kebijakan

*) Ida Kintamani adalah Peneliti pada Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas

tersebut, renstra menetapkan serangkaian indikator kunci sukses dan sekaligus menetapkan targetnya (Depdiknas, 2006b).

Target pilar pertama yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas) pada bulan Oktober 2006 sebagai indikator kunci sukses telah mencapai angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 88,68 persen. APK SMP sebesar 88,68 persen ini termasuk SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMP Luar Biasa (SMP LB), Paket B, dan Pondok Pesantren yang termasuk wajar dikdas. Dengan prestasi seperti ini Depdiknas optimis bahwa wajar dikdas akan dapat tuntas pada tahun 2008 sesuai dengan rencana (Depdiknas, 2006a).

Program wajar dikdas bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau melalui pendidikan formal dan nonformal yang mencakup SD dan MI serta pendidikan nonformal (PNF) kesetaraan SD (Paket A) dan bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs, SMP Terbuka, PNF kesetaraan SMP (Paket B) dan bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian, seluruh

anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan dapat memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai pada tingkat SMP (Depdiknas, 2007: 46).

Selain itu, pilar pertama tentang pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini juga dimaksudkan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini Depdiknas mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Bahkan, Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap negara. Oleh karena itu, pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini merupakan pilar pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti halnya komunitas internasional yang tercermin dalam *World Summit for Social Development* di Kopenhagen tahun 1995 dan *World Education Forum* di Dakar tahun 2000 (Alhumami, Media Indonesia, 21 Desember 2006).

Kemiskinan dan kesenjangan masyarakat menjadi persoalan besar pendidikan yang harus dihadapi negara karena selama kemiskinan dan kesenjangan itu masih ada maka peluang terjadinya benturan pada masyarakat akan terus muncul. Kemiskinan dan kesenjangan juga menjadi ancaman bagi terlaksananya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Menurut Julius Nyerere, mantan Presiden Tanzania, pendidikan bukan jalan untuk melarikan diri dari kemiskinan tetapi merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan kekayaan (Alhumami, Media Indonesia, 21 Desember 2006).

Target Depdiknas dalam menuntaskan wajar dikdas kelihatannya akan dapat mencapai kenyataan karena pada Oktober 2006 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya APK SMP/MTs/SMP LB, Paket B, dan Pondok Pesantren secara nasional telah mencapai 88,68 persen. Pencapaian target yang cukup menggembirakan pada sisi pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini dapat tercapai karena adanya berbagai program yang mendukung seperti adanya bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), bantuan khusus murid (BKM), rehabilitasi

ruang kelas atau sekolah maupun pembangunan ruang kelas baru secara besar-besaran (Suara Pembaruan, 24 November 2006).

Hal yang sama dikatakan dalam Media Indonesia, bahwa tercapainya APK sebesar 88,68 persen merupakan tekad pemerintah dengan meluncurkan program BOS dan BKM. BOS juga menjadi pembicaraan setiap orang tua siswa karena dengan adanya program tersebut sekolah menjadi lebih murah. Dana BOS menjadi efektif pada daerah terpencil karena bantuan yang diberikan lebih besar jika dibandingkan dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Sekolah (APBS). Dana BOS tetap berguna bagi daerah perkotaan karena menyebabkan pemerintah kabupaten/kota ikut menyumbangkan APBD mereka untuk pendidikan sehingga dana pendidikan menjadi lebih besar. (Dana BOS Sukseskan Wajar Dikdas 9 tahun, Media Indonesia, Tanggal 24 November 2006).

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kondisi pada saat sekarang dan permasalahan yang dapat terjadi dalam penuntasan wajar dikdas pada

tahun 2008. Pada tahun 2007/2008, APK SMP telah tercapai sebesar 92,52 persen (Pusat Statistik Pendidikan, 2007). Dengan demikian, permasalahannya ada tiga, yaitu (1) APK SMP sebesar 92,52 persen tahun 2007/2008 merupakan pencapaian secara nasional sehingga untuk setiap kabupaten/kota akan terdapat APK SMP yang berada di bawah maupun di atas 92,52 persen; (2) Dengan mendasarkan pada target APK SMP secara nasional sebesar 95 persen pada tahun 2008/2009, bagaimana kabupaten/kota yang pada tahun 2007/2008 jauh dari capaian APK SMP 92,52 persen?; dan (3) Dengan adanya variasi APK SMP kabupaten/kota tahun 2007/2008, bagaimana disparitasnya?

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tiga hal, yaitu (1) apakah APK SMP sebesar 92,52 persen sudah dapat dicapai oleh semua kabupaten/kota? (2) bagaimana disparitas APK SMP untuk daerah kota dan daerah kabupaten pada tahun 2007/2008, dan (3) bagaimana perbandingan disparitas APK SMP tahun 2006/2007 dan 2007/2008?

2. Kajian Teori

Berdasarkan pada kajian tentang wajar dikdas maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan: (a) disparitas, (b) angka partisipasi kasar (APK), (c) penuntasan, (d) wajib belajar, dan (e) pendidikan dasar. Disparitas yang dimaksud adalah disparitas daerah atau perbedaan antara kota dan kabupaten. APK yang dimaksud adalah APK SMP, penuntasan dimaksud adalah penuntasan untuk SMP, wajib belajar dimaksud adalah untuk SMP, sedangkan pendidikan dasar dimaksud adalah satuan pendidikan SMP.

2.1. Disparitas

Disparitas adalah perbedaan (Depdikbud, 1999). Bila dikaitkan dengan pembangunan maka disparitas pembangunan adalah kesenjangan antara pembangunan wilayah perbatasan dengan daerah-daerah lain (Antara New, 2007). Bila dikaitkan dengan bisnis dan keuangan maka terjadi disparitas harga dengan minyak tanah bagi industri dan nonusaha kecil menengah. Jika tidak ingin terjadi kelangkaan minyak tanah maka harusnya tidak ada disparitas harga (Kompas, 5 Desember 2006).

Sejalan dengan perbedaan atau disparitas di atas, bila dikaitkan dengan daerah maka disparitas daerah (DD) adalah perbedaan daerah antara kota dan kabupaten yang dihitung dari selisih komposisi kota dengan komposisi kabupaten. Makin besar nilai disparitas berarti kondisi makin buruk. Untuk indikator daerah seperti APK, maka DD APK adalah perbedaan antara APK kota dengan APK kabupaten. Rumus yang digunakan adalah

$$DD\ APK = APK\ Kota - APK\ Kabupaten$$

Penerapan rumus ini adalah bila diketahui APK kota = 80 persen dan APK kabupaten = 75 persen maka DD APK adalah $80 - 75 = 5$ persen. Artinya, APK kota lebih besar 5 persen dibandingkan dengan APK kabupaten. Agar tidak terjadi disparitas daerah maka APK kota dan APK kabupaten harus sama atau DD APK = 0 persen.

2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah salah satu alat ukur untuk menentukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. APK didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (Depdiknas, 2002). Dengan demikian, APK SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa SMP dengan penduduk usia 13-15 tahun. SMP yang dimaksud di sini adalah siswa SMP dan MTs untuk pendidikan formal, Paket B setara SMP untuk PNF, dan pondok pesantren atau Wustho khusus wajar dikdas yang dikelola oleh Departemen Agama. Rumus yang digunakan untuk menghitung APK SMP disajikan berikut ini (Ida Kintamani, 2005:25)

$$APK_{SMP} = \frac{\text{Jumlah Siswa}_{SMP}}{\text{Jumlah Penduduk}_{13-15\ \text{tahun}}} \times 100$$

Rumusan APK ini diberlakukan untuk semua kabupaten/kota di Indonesia, oleh karena itu APK_{SMP} tingkat nasional merupakan penjumlahan dari data setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, APK_{SMP} secara nasional pada tahun 2007 sebesar 92,52 persen sehingga APK_{SMP} setiap kabupaten/kota ada yang lebih besar dari 92,52 persen dan ada yang lebih kecil dari 92,52 persen.

Dalam menghitung APK_{SMP} terdapat berbagai permasalahan antara lain yang mencakup jumlah siswa SMP dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Jumlah siswa SMP bersumber pada semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan penduduk usia 13-15 tahun bersumber dari Badan Pusat Statistik. Jumlah siswa SMP dihitung dari keberadaan sekolah atau lokasi sekolah sedangkan penduduk usia 13-15 tahun dihitung dari keberadaan penduduk atau daerah di mana penduduk bertempat tinggal. Masalah lainnya adalah siswa yang bersekolah di sekolah tertentu belum tentu berasal dari lokasi sekolah tersebut karena siswa berhak masuk di sekolah yang mereka inginkan.

Untuk memahami permasalahan tersebut diberikan contoh sebagai berikut, siswa A bersekolah di kota B padahal siswa A bertempat tinggal di kabupaten C. Dalam menghitung APK seharusnya siswa A yang bertempat tinggal di kabupaten C tidak dihitung di kota B. Namun, pada kenyataannya terjadi kondisi seperti itu. Masalah-masalah tersebut di satu pihak dapat mengakibatkan terjadinya APK yang lebih besar dari 100 persen di kota (kota B). Sebaliknya, terjadi APK yang lebih kecil di kabupaten (kabupaten C). Kondisi ini

sering terjadi pada daerah perkotaan dan pinggiran kota.

Contoh lain, siswa bersekolah di kota karena tempat dia bermukim dekat dengan sekolah yang termasuk wilayah perkotaan sehingga siswa tersebut dalam APK dihitung dalam wilayah kota. Kondisi seperti ini menyebabkan daerah yang dekat dengan kota merasa dirugikan dalam hal APK. Kerugian tersebut karena siswanya dari wilayah kota ditambah dengan wilayah lain sedangkan anak usia sekolah hanya dari wilayah kota.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan APK untuk menentukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Namun, sampai saat ini penggunaan APK masih menjadi alat ukur dalam melihat kondisi dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun.

2.3. Penuntasan

Penuntasan dimaksudkan adalah penyelesaian suatu target yang telah dicanangkan. Dalam hal penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah penyelesaian target sampai tahun 2008/2009. Selain itu, tujuan penuntasan penuntasan wajar dikdas 9 tahun adalah: (1) mendorong anak-anak usia 13-15 tahun agar masuk

sekolah baik di SMP maupun pendidikan lain yang sederajat; (2) meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk SMP maupun pendidikan lain yang sederajat; (3) menurunkan angka putus sekolah baik di SMP maupun pendidikan lain yang sederajat; (4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan wajar dikdas 9 tahun; (5) meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan wajar dikdas 9 tahun; dan (6) meningkatkan peran, fungsi, dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun. (http://pelangi.dit-plp.go.id/wajib_belajar9th.htm: 1-2).

Oleh karena penuntasan wajar dikdas 9 tahun adalah program nasional maka dalam rangka mensukseskan program tersebut perlu kerja sama yang menyeluruh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dimaksud adalah pemerintah provinsi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kabupaten/kota yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pemerintah kecamatan yaitu Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, dan kelurahan/desa.

(Depdiknas dan Depag, 2005).

Menurut Sutisna, penuntasan program wajar dikdas 9 tahun di Kabupaten Purwakarta, provinsi Jawa Barat terkendala oleh sikap orang tua karena sebagian besar masyarakatnya lebih memprioritaskan anaknya bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. (Amin Syaiful, tempointeraktif.com, 1 Mei 2007).

2.4. Wajib belajar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN No.20/2003) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut (Depdiknas, 2003: 4). Selain itu, UU No.20/2003 pada Bab VIII tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa wajib belajar diberlakukan bagi setiap warga negara yang berusia enam tahun. Artinya, setiap anak usia enam tahun harus mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Dikatakan juga bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara sehingga pelaksanaannya harus diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah dan masyarakat (Depdiknas, 2003: 15).

Program wajar dikdas yang ditargetkan tuntas tahun 2008 perlu kreativitas dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat. Seperti halnya pemerataan ditujukan untuk memperluas akses pendidikan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata melalui pendidikan (Ida Kintamani, 2005:17).

Program wajar dikdas pada saat ini masih ditujukan untuk anak usia

7-15 tahun, artinya setiap anak hendaknya memiliki pendidikan minimal selama 9 tahun bersekolah atau telah lulus SMP tetapi Pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan melanjutkan wajib belajar sampai 12 tahun. Oleh karena itu, setiap warga yang berusia 21 tahun yang belum bekerja dan menikah diwajibkan untuk masuk sekolah. Kondisi ini mengakibatkan angka partisipasi di Bantul menjadi 75 persen (Kompas, 6 November 2006).

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wajib Belajar dinyatakan bahwa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya yang termasuk dalam usia wajar dikdas dapat dikenai sanksi. RPP Wajib Belajar juga mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, dan tujuan wajib belajar, penyelenggaraan program, evaluasi program, dan penjaminan wajib belajar atas hak masyarakat. Selain itu, dimuat pula pengaturan pendanaan wajib belajar yang dibedakan antara biaya investasi dan operasi. Biaya investasi menjadi tanggung jawab satuan pendidikan atau lembaga yang bersangkutan sedangkan biaya operasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Media Indonesia, 29

Desember 2006).

Menurut Sunaryanto, keberhasilan program wajar dikdas tidak bisa disimplifikasikan dengan APK dan APM semata karena siswa khususnya di daerah terpencil dan daerah sulit memerlukan anggaran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah dengan lokasi yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, anggaran yang belum mencukupi akan mempengaruhi tuntasnya wajar dikdas pada tahun 2008 (Sunaryanto, 2007).

Dilihat dari anggaran maka anggaran Depdiknas terfokus pada wajar dikdas. Dodi menegaskan bahwa untuk tahun 2007 dari sekitar Rp 43 triliun anggaran yang diusulkan sekitar 48,8 persen adalah untuk wajar dikdas 9 tahun. Program wajar dikdas 9 tahun antara lain untuk BOS yaitu dalam rangka membebaskan sekitar 40 juta siswa SD-SMP atau yang sederajat dari pungutan uang sekolah. Program dan anggaran wajar dikdas 9 tahun terdapat di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal) sedangkan untuk penelitian berada di Badan Penelitian dan Pengembangan.

(Kompas, 26 September 2006).

Dalam rangka menunjang Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun ini maka program kerja Organisasi Dharma Wanita Persatuan bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen bersama akan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi penerus bangsa karena pendidikan merupakan modal utama dalam menyejahterakan rakyat. Program wajib belajar 9 tahun ini sangat penting karena untuk meningkatkan daya saing bangsa di mana pada era globalisasi ini generasi muda yang berpendidikan, berteknologi tinggi dan juga berakhlak mulia sangat dibutuhkan. (www.presidensby.info/ibunegara/index.php/pidato/2007/05/22/84.html).

Program wajar dikdas 9 tahun yang ditargetkan tuntas tahun 2008 memerlukan menu kreatif sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya. Dengan hanya tersisa waktu satu tahun maka program tersebut harus dibantu dengan program nonformal karena jalur nonformal memberikan layanan yang fleksibel. Pendidikan kesetaraan merupakan pendukung dalam tercecernya peserta didik usia sekolah wajar dikdas dan merupakan tonggak

strategis untuk menuntaskan wajar dikdas. (Kompas, 8 November 2006).

2.5. Pendidikan Dasar

Menurut UU No.20/2003 Bagian Kedua, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar dapat berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Depdiknas, 2003:9).

3. Hasil dan Bahasan

Untuk menghasilkan APK SMP tahun 2007/2008 maka diperlukan data siswa SMP dan penduduk usia 13-15 tahun. Berdasarkan dua data tersebut kemudian dihitung APK SMP. Untuk disparitas APK SMP tahun 2007/2008 maka diperlukan dua jenis data, yaitu jumlah siswa SMP di kota dan di kabupaten dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kota dan di kabupaten. Berdasarkan dua data tersebut kemudian dihitung APK Kota dan APK Kabupaten sedangkan selisih antara APK Kota dengan APK Kabupaten merupakan disparitas APK SMP. Data siswa SMP tahun 2007 beserta dengan APK SMP dan disparitas APK SMP sudah

disosialisasikan. Oleh karena itu, hasil dan bahasan yang dilakukan berikut diurutkan sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam penulisan ini.

3.1. APK SMP Tahun 2007/2008

APK SMP secara nasional pada tahun 2007/2008 sebesar 92,52 persen. Hal ini berarti terdapat APK Kabupaten/Kota yang lebih dari 92,52 persen, sebaliknya terdapat APK Kabupaten/Kota yang kurang dari 92,52 persen. Untuk memahami kabupaten/kota mana yang telah mencapai APK yang baik maka diperlukan suatu kriteria tertentu. Kriteria ini pernah digunakan pada tahun-tahun sebelum adanya otonomi daerah, yaitu menggunakan lima kriteria. Kriteria pertama adalah tuntas paripurna, kedua adalah tuntas utama, ketiga adalah tuntas madya, keempat adalah tuntas pratama, dan kelima adalah belum tuntas.

Daerah disebut telah tuntas paripurna jika APK SMP yang dicapai adalah 95 persen ke atas, disebut tuntas utama jika yang dicapai adalah 90-95 persen, disebut tuntas madya jika yang dicapai adalah 85-90 persen, disebut tuntas pratama jika yang dicapai adalah 80-85 persen sedangkan disebut belum tuntas jika yang dicapai kurang dari 80 persen.

Tabel 1 menunjukkan pencapaian APK dengan menggunakan kelima kriteria penuntasan sehingga terdapat 187 kabupaten/kota (42,50 persen) dari 440 kabupaten/kota yang telah tuntas paripurna atau APK mencapai >95 persen. Dari ke-33 provinsi yang ada maka hanya Sulawesi Barat yang tidak ada satu pun kabupaten/kotanya yang telah tuntas paripurna. Sebaliknya, provinsi DI Yogyakarta telah dapat menuntaskan semua kabupaten/kota yang ada. Hal ini mengakibatkan DI Yogyakarta

menerima penghargaan Widyakrama atas prestasi dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun. (Amin Syaiful, 2007. tempointeraktif.com).

Selanjutnya, dari 38 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur telah dapat tuntas paripurna sebanyak 32 kabupaten/kota (84,21 persen). Provinsi DKI Jakarta telah dapat menuntaskan 5 kota (83,33 persen) dari 6 kabupaten/kota yang ada. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota telah dapat menuntaskan 23 kabupaten/

Tabel 1
Penuntasan Wajar Dikdas Menggunakan 5 Kriteria Tiap Provinsi
Tahun 2007/2008

No.	Provinsi	Paripurna		Utama		Madya		Pratama		Belum Tuntas		Jumlah
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1	DKI	5	83.33	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	6
2	Jabar	11	44.00	3	12.00	2	8.00	6	24.00	3	12.00	25
3	Banten	2	33.33	1	16.67	1	16.67	1	16.67	1	16.67	6
4	Jateng	23	65.71	6	17.14	4	11.43	2	5.71	0	0.00	35
5	DIY	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5
6	Jatim	32	84.21	2	5.26	2	5.26	1	2.63	1	2.63	38
7	NAD	14	66.67	0	0.00	4	19.05	0	0.00	3	14.29	21
8	Sumut	16	64.00	4	16.00	3	12.00	0	0.00	2	8.00	25
9	Sumbar	12	63.16	1	5.26	1	5.26	0	0.00	5	26.32	19
10	Riau	8	72.73	1	9.09	2	18.18	0	0.00	0	0.00	11
11	Kepri	3	50.00	0	0.00	1	16.67	2	33.33	0	0.00	6
12	Jambi	4	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	0	0.00	10
13	Sumsel	4	28.57	1	7.14	3	21.43	2	14.29	4	28.57	14
14	Babel	1	14.29	3	42.86	0	0.00	0	0.00	3	42.86	7
15	Bengkulu	3	33.33	0	0.00	1	11.11	4	44.44	1	11.11	9
16	Lampung	3	30.00	3	30.00	1	10.00	2	20.00	1	10.00	10
17	Kalbar	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	83.33	12
18	Kalteng	1	7.14	5	35.71	3	21.43	1	7.14	4	28.57	14
19	Kalsel	2	15.38	0	0.00	3	23.08	1	7.69	7	53.85	13
20	Kaltim	4	30.77	0	0.00	1	7.69	4	30.77	4	30.77	13
21	Sulut	6	66.67	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9
22	Gorontalo	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	5
23	Sulteng	1	10.00	3	30.00	1	10.00	1	10.00	4	40.00	10
24	Sulsel	2	8.70	6	26.09	3	13.04	3	13.04	9	39.13	23
25	Sulbar	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	3	60.00	5
26	Sultra	2	20.00	4	40.00	2	20.00	0	0.00	2	20.00	10
27	Maluku	4	50.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00	8
28	Malut	1	12.50	3	37.50	1	12.50	1	12.50	2	25.00	8
29	Bali	6	66.67	2	22.22	1	11.11	0	0.00	0	0.00	9
30	NTB	4	44.44	1	11.11	3	33.33	0	0.00	1	11.11	9
31	NTT	3	18.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	81.25	16
32	Papua	1	5.00	1	5.00	1	5.00	0	0.00	17	85.00	20
33	Papua Barat	1	11.11	0	0.00	2	22.22	1	11.11	5	55.56	9
	Jumlah	187	42.50	57	12.95	50	11.36	35	7.95	111	25.23	440

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, 2007

kota (65,71 persen) sedangkan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, dan Bali telah dapat menuntaskan sebesar 66,67 persen dari kabupaten/kota yang ada. Sebaliknya, provinsi Papua mencapai tuntas paripurna hanya 1 kabupaten/kota (5 persen), demikian juga 8 provinsi lainnya hanya 1 kabupaten/kota yang telah tuntas paripurna, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat.

Dengan menggunakan kriteria tuntas utama maka terdapat 57 kabupaten/kota (12,95 persen) dari 440 kabupaten/kota yang telah mencapai APK sebesar 90-95 persen. Dari ke-33 provinsi yang ada maka 11 provinsi yang tak satu pun kabupaten/kotanya telah mencapai tuntas utama, yaitu DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Provinsi Bangka Belitung yang dapat tuntas utama terbesar yaitu 3 kabupaten/kota (42,86 persen) dari 7 kabupaten/kota yang ada sedangkan 20 provinsi lainnya dengan tuntas utama kurang dari 40 persen.

Dengan menggunakan kriteria tuntas madya maka terdapat 50

kabupaten/kota (11,36 persen) dari 440 kabupaten/kota yang telah mencapai APK sebesar 85-90 persen. Dari ke-33 provinsi yang ada maka 7 provinsi yang tak satu pun kabupaten/kotanya telah mencapai tuntas madya, yaitu DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang dapat tuntas madya terbesar yaitu 2 kabupaten (40,00 persen) dari 5 kabupaten yang ada, sedangkan 24 provinsi lainnya dengan tuntas madya kurang dari 40 persen.

Dengan menggunakan kriteria tuntas pratama maka terdapat 35 kabupaten/kota (7,95 persen) dari 440 kabupaten/kota yang telah mencapai APK sebesar 80-85 persen. Dari ke-33 provinsi yang ada maka 11 provinsi yang tak satu pun kabupaten/kotanya telah mencapai tuntas pratama, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Provinsi Bengkulu yang dapat tuntas pratama terbesar, yaitu 4 kabupaten/kota (44,44 persen) dari 9 kabupaten/kota yang ada sedangkan 16 provinsi lainnya dengan

penuntasan kurang dari 40 persen.

Provinsi yang belum tuntas wajar dikdas dengan APK kurang dari 80 persen mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 111 kabupaten/kota (25,23 persen) dari 440 kabupaten/kota yang ada. Dari ke-33 provinsi yang ada, delapan provinsi, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sulawesi Utara, dan Bali yang sudah tuntas. Provinsi Papua memiliki kabupaten/kota yang paling banyak belum tuntas, yaitu 17 kabupaten/kota (85,00 persen) dari 20 kabupaten/kota yang ada. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 10 kabupaten/kota (83,33 persen) dari 12 kabupaten/kota yang ada belum tuntas diikuti Nusa Tenggara Timur sebanyak 13 kabupaten/kota (81,25 persen), dan Gorontalo sebanyak 4 kabupaten/kota (80,00 persen) sedangkan 21 provinsi lainnya yang belum tuntas kurang dari 80 persen.

Bila dilihat dalam jumlah kabupaten/kota yang ada maka Papua memiliki 17 kabupaten yang paling banyak belum tuntas jika dibandingkan provinsi lainnya. Kalimantan Barat sebanyak 10 kabupaten, Nusa Tenggara Timur sebanyak 13 kabupaten, dan Sulawesi Selatan sebanyak 9 kabupaten belum

tuntas. Masih rendahnya APK SMP di Nusa Tenggara Timur dan masih banyaknya kabupaten yang belum tuntas dapat dilihat dari kondisi geografisnya. Geografis yang sulit seperti antara rumah penduduk sangat berjauhan, tinggal di puncak-puncak gunung, apalagi dengan lokasi sekolah yang berjauhan sehingga perlu cara lain dalam menuntaskan wajar dikdas (www.presidensby.info/ibunegara/index.php/pidato/2007/05/22/84.html). Selain itu, karena kondisi ekonomi dan kultural masyarakatnya menyebabkan APK SMP masih rendah karena anak-anak menjadi tumpuan ekonomi keluarga sehingga tidak bersekolah di SMP setelah tamat SD. (www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=97635). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 25 provinsi harus berusaha menuntaskan wajar dikdas.

Berdasarkan lima kriteria penuntasan maka hanya DI Yogyakarta telah tuntas paripurna pada tahun 2007 karena semua kabupaten/kota telah tuntas paripurna. Sulawesi Utara telah tuntas utama pada tahun 2007 karena 6 kabupaten/kota telah tuntas paripurna dan 3 kabupaten/kota tuntas utama. Riau dan Bali telah tuntas madya pada tahun 2007. Riau

telah tuntas madya karena 8 kabupaten/kotanya telah tuntas paripurna, 1 kabupaten telah tuntas utama dan 2 kabupaten telah tuntas madya. Hal yang sama untuk Bali telah tuntas madya karena 6 kabupaten/kota telah tuntas paripurna, 2 kabupaten telah tuntas utama, dan 1 kabupaten telah tuntas madya.

DKI Jakarta telah tuntas pratama karena 5 kota telah tuntas paripurna dan 1 kabupaten telah tuntas pratama. Demikian juga, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Jambi telah tuntas pratama. Provinsi Jawa Tengah telah tuntas pratama karena 23 kabupaten/kota telah tuntas paripurna, 6 kabupaten telah tuntas utama, 4 kabupaten telah tuntas madya dan 2 kabupaten telah tuntas pratama, Kepulauan Riau telah tuntas paripurna karena 3 kabupaten/kota telah tuntas paripurna, 1 kabupaten telah tuntas madya dan 2 kabupaten telah tuntas pratama, sedangkan Jambi telah tuntas pratama karena 4 kabupaten/kota telah tuntas paripurna, 2 kabupaten telah tuntas utama, 2 kabupaten telah tuntas madya dan 2 kabupaten telah tuntas pratama.

Menurut Ahmad, APK SMP di kabupaten sangat kecil ini terjadi akibat terdapatnya keluarga miskin dan tidak terdidik yang merupakan

golongan terbesar di negeri ini. Selain itu, rusaknya struktur masyarakat berakibat terjadi kesenjangan sosial yang tidak diinginkan. Kondisi ini terjadi justru pada era otonomi yang seharusnya ada perubahan menuju perbaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah akan lebih baik. (Ahmad Djauzak. 2005. www.kompas.com).

Hal yang sama disebutkan oleh Ritonga, bahwa masalah kemiskinan merupakan kendala dalam meningkatkan APK SMP. Hasil Potensi Desa tahun 2005 menunjukkan dari 69.957 desa/kelurahan/nagari di Indonesia yang memiliki SMP hanya 23.320 desa (33,33 persen) dan pada umumnya desa yang belum memiliki SMP berada di luar Jawa dan terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian timur. (Ritonga, Razali, 2007: www.media-indonesia.com)

3.2. Disparitas APK Tahun 2007/2008

Sesuai dengan metode perhitungan maka dapat dihitung disparitas APK secara nasional pada tahun 2007 yang disajikan pada Tabel 2.

Disparitas APK secara nasional sebesar 23,93 persen, artinya masih terjadi perbedaan APK Kota dengan APK kabupaten di Indonesia sebesar 23,93 persen karena APK Kota sebesar 112,07 persen dan APK Kabupaten sebesar 88,14 persen. Disparitas terbesar terjadi provinsi Kalimantan Tengah (51,64%) dan disparitas terkecil terjadi di Maluku

Utara (1,28%). Hal ini berarti kondisi Kalimantan Tengah yang paling buruk dan Maluku Utara yang paling baik. Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat disparitas karena tidak memiliki kota atau semua wilayahnya adalah kabupaten.

Bila angka nasional dijadikan norma disparitas APK yang masih dapat ditoleransi maka nilai disparitas

Tabel 2
Disparitas APK SMP Tiap Provinsi Tahun 2007

No.	Provinsi	Kota	Kab.	Rata2	Disparitas
1	DKI Jakarta	112.57	84.31	112.45	28.27
2	Jawa Barat	112.37	83.70	88.90	28.67
3	Banten	116.03	83.96	88.78	32.07
4	Jawa Tengah	118.20	95.02	96.93	23.18
5	DI Yogyakarta	138.21	107.82	111.70	30.39
6	Jawa Timur	115.49	97.63	99.74	17.87
7	N. Aceh Darussalam	122.41	96.74	99.45	25.67
8	Sumatera Utara	121.37	91.26	98.25	30.12
9	Sumatera Barat	119.45	86.20	93.90	33.26
10	Riau	106.51	95.50	98.06	11.02
11	Kepulauan Riau	110.33	86.85	96.18	23.47
12	Jambi	102.50	90.86	92.97	11.64
13	Sumatera Selatan	103.24	79.76	84.79	23.48
14	Bangka Belitung	115.21	84.38	89.06	30.83
15	Bengkulu	116.71	87.31	92.15	29.40
16	Lampung	111.36	88.75	91.64	22.61
17	Kalimantan Barat	106.23	72.17	76.88	34.05
18	Kalimantan Tengah	127.69	76.05	79.95	51.64
19	Kalimantan Selatan	102.58	77.03	81.87	25.55
20	Kalimantan Timur	102.90	80.06	89.26	22.84
21	Sulawesi Utara	103.70	95.10	97.63	8.60
22	Gorontalo	104.59	72.56	77.74	32.03
23	Sulawesi Tengah	105.81	72.74	76.33	33.07
24	Sulawesi Selatan	95.10	81.43	83.80	13.67
25	Sulawesi Barat	0.00	80.09	80.09	0.00
26	Sulawesi Tenggara	104.12	85.76	88.76	18.36
27	Maluku	112.29	85.23	89.94	27.06
28	Maluku Utara	88.82	87.54	87.92	1.28
29	Bali	119.33	96.70	99.78	22.63
30	Nusa Tenggara Barat	106.14	94.06	95.33	12.08
31	Nusa Tenggara Timur	112.88	67.57	69.78	45.30
32	Papua	102.42	69.61	72.21	32.80
33	Papua Barat	100.35	68.13	74.65	32.22
	Indonesia	112.07	88.14	92.52	23.93

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, 2007

di atas nasional adalah kondisi yang lebih buruk dari nasional. Sebaliknya, nilai di bawah nasional adalah kondisi yang lebih baik dari nasional. Disparitas yang lebih baik dari nasional terdapat di 14 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sisanya, 19 provinsi lainnya disparitasnya lebih buruk dari nasional.

Dengan melihat besarnya disparitas di semua provinsi, hal ini menunjukkan masih kurang seimbang kondisi sekolah antara kota dan kabupaten sehingga pencapaian APK juga menjadi tidak seimbang. Kurangnya seimbang pencapaian APK dapat dilihat dari kuantitas dan keberadaan sekolah, yaitu sekolah di kota banyak dan sekolah di kabupaten kurang. Bila dilihat kondisi kota pada umumnya memang lebih baik daripada kabupaten. Hal yang sama untuk kondisi sekolahnya. Hal ini menyebabkan banyak siswa dari kabupaten yang masuk sekolah di kota apalagi bila daerah kabupaten merupakan pinggiran kota walaupun sekolah di kabupaten cukup banyak. Sebaliknya, kabupaten memang

benar-benar masih kekurangan sekolah sehingga banyak siswa bersekolah di kota. Melihat kondisi seperti ini maka sekolah di kabupaten harus diperbaiki baik dalam segi infrastruktur maupun mutunya. Dengan kondisi mutu yang sama antara sekolah di kabupaten dan kota maka diharapkan siswa akan bersekolah di wilayahnya masing-masing sehingga APK kabupaten akan meningkat dan akibatnya disparitas akan makin menurun.

3.3. Perbandingan Disparitas APK tahun 2006/2007 dan 2007/2008

Untuk menjelaskan tentang disparitas APK SMP daerah maka perlu disajikan dengan kondisi tahun 2006/2007 sehingga akan terlihat apakah ada kenaikan atau penurunan disparitas selama dua tahun. Berdasarkan pada Tabel 2, besarnya disparitas menunjukkan bahwa pembangunan sekolah yang selama ini dilakukan ternyata lebih banyak dilakukan di kota. Hal ini wajar karena daerah kota lebih mudah dijangkau jika dibandingkan dengan daerah kabupaten. Bila sekolah banyak dibangun di kota maka banyak siswa bersekolah di kota sehingga tidak akan menurunkan disparitas daerah antara kabupaten dengan kota.

Selain itu, bersekolah di kota kelihatannya lebih diminati oleh siswa jika dibandingkan dengan bersekolah di kabupaten. Sebaliknya, walaupun sekolah banyak dibangun di kabupaten ternyata karena mutu sekolah lebih baik di kota sehingga banyak siswa yang berada di pinggiran kota bersekolah di kota. Hal ini bisa mengakibatkan sekolah di kabupaten walaupun cukup banyak namun jumlah siswanya tidak dapat terjadi sekolah di kabupaten akan kekurangan siswa.

Menurut Ahmad, disparitas APK SMP ini terjadi akibat adanya kekeliruan yang telah dibuat pemerintah bahwa wewenang pendidikan yang begitu luas diberikan pada kabupaten/kota. Padahal, di daerah tersebut belum tersedia tenaga pendidikan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan di daerahnya. Hal ini terlihat dari banyaknya pejabat yang mengangani masalah pendidikan tidak mengetahui benar akan tugasnya atau bukan berasal dari bidang pendidikan. (Ahmad Djauzak. 2005. www.kompas.com).

Berdasarkan Tabel 3, secara nasional terjadi penurunan disparitas walaupun sangat kecil, yaitu 0,06 persen. Namun dilihat dari 33 provinsi

yang ada ternyata hanya 19 provinsi telah terjadi perbaikan disparitas dan 14 provinsi lainnya meningkat disparitasnya. Perbaikan disparitas pada 19 provinsi berarti telah terjadi penurunan disparitas antara kota dan kabupaten, walaupun penurunan itu tidak begitu besar yaitu antara 0,02 persen (di Sumatera Barat) sampai 9,08 persen (di Jambi). Provinsi Jambi (9,08 persen) menunjukkan penurunan disparitas yang paling besar, Banten (6,31 persen), Kalimantan Timur (4,52 persen), Gorontalo (3,34 persen), Sumatera Selatan (3,42 persen), Kalimantan Selatan (2,45 persen), dan Lampung (2,41 persen). Selanjutnya, 12 provinsi lainnya terjadi penurunan disparitas kurang dari 2 persen.

Besarnya penurunan disparitas di provinsi Jambi menunjukkan bahwa provinsi tersebut telah dapat mengubah kondisi siswa yang bersekolah di kabupaten makin meningkat dalam satu tahun. Penurunan disparitas ini juga akibat adanya sejumlah program yang diluncurkan untuk suksesnya wajar dikdas 9 tahun antara lain adalah program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan khusus murid (BKM). Melalui BOS tersebut siswa dibebaskan dari iuran sekolah,

Tabel 3
Perbandingan Disparitas APK Tiap Provinsi Tahun 2006-2007

No.	Provinsi	Tahun 2006			Tahun 2007			Perbedaan Disparitas
		Kota	Kab.	Disparitas	Kota	Kab.	Disparitas	
1	DKI Jakarta	106.18	80.04	26.14	112.57	84.31	28.27	2.13
2	Jawa Barat	107.80	78.84	28.96	112.37	83.70	28.67	-0.29
3	Banten	113.55	75.17	38.38	116.03	83.96	32.07	-6.31
4	Jawa Tengah	114.77	92.40	22.36	118.20	95.02	23.18	0.81
5	DI Yogyakarta	129.49	103.54	25.95	138.21	107.82	30.39	4.44
6	Jawa Timur	112.28	94.77	17.52	115.49	97.63	17.87	0.35
7	N. Aceh Darussalam	112.65	89.66	22.99	122.41	96.74	25.67	2.68
8	Sumatera Utara	118.76	89.47	29.30	121.37	91.26	30.12	0.82
9	Sumatera Barat	116.86	83.58	33.28	119.45	86.20	33.26	-0.02
10	Riau	105.63	92.86	12.76	106.51	95.50	11.02	-1.75
11	Kepulauan Riau	104.06	84.58	19.48	110.33	86.85	23.47	3.99
12	Jambi	109.49	88.77	20.71	102.50	90.86	11.64	-9.08
13	Sumatera Selatan	101.06	74.16	26.90	103.24	79.76	23.48	-3.42
14	Bangka Belitung	112.56	80.49	32.07	115.21	84.38	30.83	-1.24
15	Bengkulu	112.76	83.58	29.18	116.71	87.31	29.40	0.22
16	Lampung	110.50	85.47	25.03	111.36	88.75	22.61	-2.41
17	Kalimantan Barat	101.68	67.81	33.87	106.23	72.17	34.05	0.18
18	Kalimantan Tengah	109.99	64.01	45.98	127.69	76.05	51.64	5.66
19	Kalimantan Selatan	100.31	72.30	28.00	102.58	77.03	25.55	-2.45
20	Kalimantan Timur	101.96	74.61	27.35	102.90	80.06	22.84	-4.52
21	Sulawesi Utara	102.23	92.13	10.10	103.70	95.10	8.60	-1.50
22	Gorontalo	101.36	66.00	35.36	104.59	72.56	32.03	-3.34
23	Sulawesi Tengah	102.02	69.24	32.79	105.81	72.74	33.07	0.29
24	Sulawesi Selatan	91.31	77.14	14.17	95.10	81.43	13.67	-0.49
25	Sulawesi Barat	0.00	76.07	0.00	0.00	80.09	0.00	0.00
26	Sulawesi Tenggara	101.92	81.69	20.23	104.12	85.76	18.36	-1.87
27	Maluku	108.24	81.66	26.57	112.29	85.23	27.06	0.49
28	Maluku Utara	84.99	83.39	1.59	88.82	87.54	1.28	-0.32
29	Bali	115.73	93.02	22.71	119.33	96.70	22.63	-0.08
30	Nusa Tenggara Barat	103.88	91.15	12.73	106.14	94.06	12.08	-0.65
31	Nusa Tenggara Timur	92.21	63.03	29.18	112.88	67.57	45.30	16.13
32	Papua	97.26	64.38	32.89	102.42	69.61	32.80	-0.08
33	Papua Barat	96.61	63.83	32.78	100.35	68.13	32.22	-0.56
34	Indonesia	108.18	84.19	23.99	112.07	88.14	23.93	-0.06

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, 2007

biaya buku sekolah dan adanya peningkatan pengadaan perlengkapan sekolah. Dana BOS ini sangat efektif pada wilayah kabupaten dan daerah terpencil. (Media Indonesia, 24 November 2006).

Peningkatan disparitas di 14 provinsi berarti tidak ada perbaikan disparitas atau kondisi menjadi lebih buruk daripada tahun 2006/2007. Peningkatan terbesar terjadi pada

provinsi Nusa Tenggara Timur (16,13 persen), Kalimantan Tengah (5,66 persen), DI Yogyakarta (4,44 persen) dan Kepulauan Riau (3,99 persen). Selanjutnya, 10 provinsi lainnya terjadi peningkatan disparitas kurang dari 3 persen.

Berdasarkan riset dari Indonesia *Corruption Watch* pada tahun 2006, di 10 kabupaten/kota di Indonesia masih terdapat orang tua siswa pada

SD yang masih menanggung beban biaya pendidikan sebesar Rp 1,5 juta yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Kondisi ini juga menyebutkan aksesibilitas pendidikan pada wajar dikdas 9 tahun belum dapat dikategorikan mudah diraih karena masyarakat belum mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma (Sunaryanto, anti-korupsi.org). Masih adanya biaya pendidikan ini dapat menjadi penyebab masih meningkatnya disparitas APK SMP.

Untuk dapat memahami apakah terjadi kenaikan atau penurunan disparitas APK setiap provinsi maka masing-masing provinsi dan nasional diberikan peringkat, yaitu antara 1 sampai 34 untuk tahun 2006 dan 2007 seperti disajikan pada Tabel 4. Peringkat 1 yang terbaik sedangkan peringkat 34 yang terburuk. Disparitas nasional juga diberikan peringkat dengan tujuan bahwa peringkat di atas nasional masih dapat ditoleransi disparitasnya sedangkan peringkat di bawah nasional perlu penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 4 maka posisi nasional mengalami penurunan peringkat dari 14 menjadi 16. Hal ini menyebabkan terdapat 14 provinsi yang mengalami penurunan peringkat, 6 provinsi tetap dalam

peringkatnya dan 13 provinsi yang mengalami kenaikan peringkat. Provinsi yang mengalami penurunan peringkat berarti kondisinya disparitas APK SMP makin menurun terjadi di 14, provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Penurunan yang paling tajam terjadi di tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur yaitu dari 13 menjadi 23, DI Yogyakarta dari 16 menjadi 24, dan Kepulauan Riau dari 8 menjadi 14 sedangkan 11 provinsi lainnya mengalami penurunan kurang dari 6.

Provinsi yang tetap dalam peringkatnya berarti tidak ada perbaikan disparitas terjadi di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (peringkat 34), Sulawesi Utara (peringkat 3), Sulawesi Tenggara (peringkat 9), Maluku Utara (peringkat 2), dan Papua (peringkat 29) sedangkan Sulawesi Barat tidak ada disparitas. Walaupun kondisi Kalimantan Tengah tetap pada peringkatnya namun termasuk yang paling buruk, demikian juga Papua.

Provinsi yang mengalami kenaikan peringkat berarti terjadi perbaikan

Tabel 4
Disparitas APK SMP menurut Peringkat Provinsi
Tahun 2006 dan 2007

No.	Propinsi	2006	Peringkat	Provinsi	2007	Peringkat
1	Sulawesi Barat	0	1	Sulawesi Barat	0	1
2	Maluku Utara	1.59	2	Maluku Utara	1.28	2
3	Sulawesi Utara	10.1	3	Sulawesi Utara	8.60	3
4	Nusa Tenggara Barat	12.73	4	Riau	11.02	4
5	Riau	12.76	5	Jambi	11.64	5
6	Sulawesi Selatan	14.17	6	Nusa Tenggara Barat	12.08	6
7	Jawa Timur	17.52	7	Sulawesi Selatan	13.67	7
8	Kepulauan Riau	19.48	8	Jawa Timur	17.87	8
9	Sulawesi Tenggara	20.23	9	Sulawesi Tenggara	18.36	9
10	Jambi	20.71	10	Lampung	22.61	10
11	Jawa Tengah	22.36	11	Bali	22.63	11
12	Bali	22.71	12	Kalimantan Timur	22.84	12
13	N. Aceh Darussalam	22.99	13	Jawa Tengah	23.18	13
14	Indonesia	23.99	14	Kepulauan Riau	23.47	14
15	Lampung	25.03	15	Sumatera Selatan	23.48	15
16	DI Yogyakarta	25.95	16	Indonesia	23.93	16
17	DKI Jakarta	26.14	17	Kalimantan Selatan	25.55	17
18	Maluku	26.57	18	N. Aceh Darussalam	25.67	18
19	Sumatera Selatan	26.9	19	Maluku	27.06	19
20	Kalimantan Timur	27.35	20	DKI Jakarta	28.27	20
21	Kalimantan Selatan	28	21	Jawa Barat	28.67	21
22	Jawa Barat	28.96	22	Bengkulu	29.40	22
23	Nusa Tenggara Timur	29.18	23	Sumatera Utara	30.12	23
24	Bengkulu	29.18	24	DI Yogyakarta	30.39	24
25	Sumatera Utara	29.3	25	Bangka Belitung	30.83	25
26	Bangka Belitung	32.07	26	Gorontalo	32.03	26
27	Papua Barat	32.78	27	Banten	32.07	27
28	Sulawesi Tengah	32.79	28	Papua Barat	32.22	28
29	Papua	32.89	29	Papua	32.80	29
30	Sumatera Barat	33.28	30	Sulawesi Tengah	33.07	30
31	Kalimantan Barat	33.87	31	Sumatera Barat	33.26	31
32	Gorontalo	35.36	32	Kalimantan Barat	34.05	32
33	Banten	38.38	33	Nusa Tenggara Timur	45.30	33
34	Kalimantan Tengah	45.98	34	Kalimantan Tengah	51.64	34

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, 2007

disparitas, yaitu: (1) Jawa Barat, (2) Banten, (3) Sumatera Utara, (4) Riau, (5) Jambi, (6) Sumatera Selatan, (7) Bangka Belitung, (8) Bengkulu, (9) Lampung, (10) Kalimantan Selatan, (11) Kalimantan Timur, (12) Gorontalo, dan (13) Bali. Dari ke-13 provinsi tersebut, Kalimantan Timur yang mengalami penurunan paling besar, yang berarti paling bagus disparitasnya, yaitu dari 20 menjadi

12, Banten juga mengalami penurunan dari 33 menjadi 27 dan Gorontalo dari 32 menjadi 26.

4. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil dan bahasan di atas maka penuntasan wajar dikdas secara nasional dapat terlaksana pada tahun 2008/2009 karena kondisi tahun 2007/2008 telah mencapai 92,52 persen

sehingga hanya 2,48 persen tambahan yang diperlukan untuk mencapai 95 persen. Namun, secara provinsi belum dapat dilakukan penuntasan karena masih terdapat 25 provinsi yang kabupatennya belum tuntas dan masih 111 kabupaten yang ada dalam 25 provinsi tersebut yang belum tuntas wajar dikdas walaupun dengan tuntas pratama (APK 80-85 persen). Provinsi yang telah tuntas wajar dikdas dengan APK SMP lebih besar dari 95,00 persen atau tuntas paripurna pada tahun 2007/2008 adalah DI Yogyakarta, tuntas utama adalah Sulawesi Utara, tuntas madya adalah Riau dan Bali, dan tuntas pratama adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Jambi.

Dilihat dari disparitas APK SMP tahun 2007/2008 ternyata secara nasional pun masih terdapat disparitas sebesar 23,93 persen. Disparitas terbesar terjadi di Nusa Tenggara Timur (45,30 persen) dan terkecil atau terbaik di Maluku Utara (1,28 persen). Besarnya disparitas di Nusa Tenggara Timur akibat banyaknya daerah yang sulit sedangkan disparitas di Maluku Utara karena kondisi kota dan kabupaten tidak terlalu jauh berbeda.

Bila dibandingkan dengan disparitas APK SMP tahun 2006 (23,99 persen) dengan tahun 2007

(23,93 persen) ternyata secara nasional kondisinya sedikit membaik karena menurun sebesar 0,06 persen. Disparitas APK SMP makin meningkat dan terbesar yang berarti kondisi makin buruk terjadi di Nusa Tenggara Timur (16,13 persen) dan terkecil terjadi di Kalimantan Barat (0,18 persen). Disparitas APK makin menurun dan terbesar yang berarti kondisi makin bagus terjadi di Jambi (9,08 persen) dan terkecil terjadi di Sumatera Barat (0,02 persen).

4.2. Saran

Dengan melihat kondisi APK SMP dan disparitas yang terjadi pada APK SMP tahun 2007/2008 dan perbandingan dengan APK SMP tahun 2006/2007 dalam simpulan maka disarankan agar pemerintah kabupaten/kota yang belum tuntas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih efektif sehingga 111 kabupaten yang belum tuntas pada tahun 2007/2008 akan tuntas pada tahun 2008/2009, khususnya untuk provinsi Papua. Selain itu, pelayanan pendidikan di kabupaten harus lebih ditingkatkan terutama dalam hal mutu pendidikan sehingga anak yang berada di kabupaten tetap bersekolah di kabupatennya sendiri. Bila semua siswa dapat bersekolah di kabupatennya masing-

masing maka APK SMP dapat ditingkatkan dan pada akhirnya disparitas APK SMP juga akan berkurang.

Menurut Sunaryanto, ketercukupan anggaran pendidikan juga memegang peranan penting karena menyangkut aksesibilitas yang direpresentasi dalam APK SMP. Walaupun anggaran pendidikan masih minimal namun APK sudah cukup tinggi. Tingginya APK ini juga akibat tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan baik untuk perubahan derajat hidup maupun prestise (antikorupsi.org). Namun, untuk provinsi Papua yang hampir 85% kabupatennya belum tuntas hendaknya mendapatkan prioritas agar anggaran pendidikan ditingkatkan sehingga permasalahan penuntasan wajar dikdas dapat tercapai. Untuk itu,

Pustaka Acuan

- Ahmad Djauzak. 2005. Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan. www.kompas.com/kompas-cetak/0408/05/pddkn/1190244.htm
- Alhumami, Amich. 2006. *Kunci Kurangi Kemiskinan. Pendidikan yang Merata dan Berkualitas*. Media Indonesia, Jakarta: 21 Desember 2006
- Amin, Syaiful. 2007. Yogyakarta Sukses Realisasikan Wajib Belajar 9 Tahun. (tempointeraktif.com/h/nominal/2006/02/25/brk,20060225-74494.id.html). 1 Mei 2007
- Antara New. 2007. *Jangan Biarkan Disparitas Pembangunan, Kata Presiden*. Jakarta: 23 Agustus 2007

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006a. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Depdiknas Tahun 2005-2006* (status 17 Oktober 2006) Buku I (Ringkasan Eksekutif), Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006b. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Depdiknas Tahun 2005-2006* (status 17 Oktober 2006) Buku II (Laporan Lengkap), Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009*, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengkajian 13 Indikator Pendidikan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2005. *Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2006-2009*. Jakarta
- http://pelangi.dit-plp.go.id/wajib_belajar9th.htm
- Ida Kintamani. 2005. *Data dan Indikator Pendidikan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan
- Kompas, 2006. *Wajar Perlu Kreativitas: Disesuaikan dengan Kondisi Geografis dan Sosbud*. Jakarta: 8 November 2006
- Kompas. 2006. *Bantu akan Melanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun*. Jakarta: 6 November 2006
- Kompas. 2006. *Minyak Tanah. Kelangkaan Terjadi karena Ada Disparitas Harga*. Jakarta: 5 Desember 2006
- Kompas. 2006. *Anggaran Terfokus ke Wajib Belajar Peningkatan Mutu Diprioritaskan*. Jakarta: 26 September 2006
- Media Indonesia. 2006. *Presiden segera teken RPP Wajib Belajar. Orang Tua Bisa Kena Sanksi*. Jakarta: 29 Desember 2006
- Media Indonesia. 2006. *Dana BOS Sukseskan Wajar Dikdas 9 tahun*. Jakarta: 24 November 2006
- Media Indonesia. 2007. *Partisipasi Wajib Belajar Rendah Daerah Bakal Dikenai Sanksi*. Jakarta: 27 Maret 2007

- Pusat Statistik Pendidikan, 2007, *Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) TK, SD, SMP, SM 2007/200*, Belum Dipublikasikan.
- Suara Pembaruan, 2006. *Target Rencana Strategis Terpenuhi*. Jakarta: 24 November 2006
- Sunaryanto, A. 2007. *Wajib Belajar Tak Sekedar Angka Partisipasi* (antikorupsi.org/mod.php?publisher&op=viewarticle&artid=9860 diakses tgl. 15 Juni 2007)
- Sambutan Silaturahmi dengan Peserta Workshop Program Percepatan Wajib Belajar 9 Tahun (www.presidensby.info/ibunegara/index.php/pidato/2007/05/22/84.html, diakses tgl. 15 Juni 2007)
- Ritonga, Razali, 2007, www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134316. Kemiskinan dan Penuntasan Wajib Belajar. 31 Mei 2007
- www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=97635. Program Wajib Belajar 9 Tahun Ditargetkan tuntas 2009. 25 April 2006